

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Amin dan Mufham, 2006, *Manajemen Pengawasan*, Jakarta: Kalam Indonesia.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Pra ktek*, Jakarta Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kans il, 2008, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemeritahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Jazim Hamidi, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustakarayah, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Wibowo, Edi, Dkk, 2004, *Memahami Good Government Governance dan Good Corporte Governance*, YPAPI, Yogyakarta.
- Tri Widodo, 2001, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Widjaja, Haw, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafikas, Jakarta.

B. Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang

Peraturan DPRD Kota Padang Panjang Nomor 1A Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang Panjang

C. Jurnal

Aminudin, “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, Jurnal Katalogis, Vol. 3 No.12, Desember 2015

Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah”, Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1 Juni 2014.

Mirza Muhammad, “Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus tentang Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Jepara)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016.

Djauhari, Achmad Ridwan, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme(KKN)(Studi di Kabupaten Bombana)”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2 No. 2 Mei - Agustus 2001.

Budiyono, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance, “Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1, Januari-April 2013.

Hariande L. Bintang dan Ahmad Jamaan, “Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda, “Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 11, Nomor 1, Juni 2013.

D. Internet

Fakultas hukum Universitas Andalas, *Metode penulisan dan penelitian hukum*, tersedia di

<https://www.scribd.com/docuimeint/329398499/Peingeirtian-Peineilitian Yuiridis-Eimpiris>,

